



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2022 untuk urusan **Komunikasi dan Informatika** memiliki 3 (Tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan untuk program ini adalah **Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan target sebesar **100 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 2.451.506.197** ; dan terealisasi sebesar **Rp. 2.248.844.309**; atau realisasi keuangan sebesar **91,73 %**.

1.2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan untuk program ini adalah **Persentase Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik** dengan target sebesar **100 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp.2.076.959.800**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.877.765.850**; atau realisasi keuangan sebesar **90,41%**.

1.3. Program Aplikasi Informatika

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan untuk program ini adalah **Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik** dengan target sebesar **2,5 Indeks** dan kinerja di akhir periode tercapai **2,29** Indeks. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar Rp. **2.705.183.670**; dan terealisasi sebesar Rp. **2.413.095.476**; atau realisasi keuangan sebesar **89,20%**.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 %**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar Rp. **17.781.100**; dan terealisasi sebesar Rp. **17.779.800**; atau realisasi keuangan sebesar **99,99%**.

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Terwujudnya penyusunan laporan kegiatan OPD** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100%**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar Rp. **17.781.100**; dan terealisasi sebesar Rp. **17.779.800**; atau realisasi keuangan sebesar **99,99%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah Dokumen pendukung laporan yang kadang terlambat sehingga laporan juga harus terlambat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah selalu melakukan koordinasi dan konsultasi demi kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terlaksananya tertib administrasi keuangan** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 2.081.480.957**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.879.641.949**; atau realisasi keuangan sebesar **90,30%**.

2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Gaji dan Tunjangan ASN** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 %**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 2.064.136.577**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.862.371.449**; atau realisasi keuangan sebesar **90,23%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah adanya pembayaran tunjangan ASN (TPP) yang tidak terealisasi sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu selama 4 Bulan dari bulan September – Desember 2022 namun kinerja sub kegiatan tetap di capai karena ASN melakukan tugas seperti biasa.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah memberikan pemahaman ke ASN bahwa hal ini sebagai sesuatu yang harus terjadi karena kondisi keuangan daerah.

2.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode

adalah **100,00%**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 13.344.380**; dan terealisasi sebesar **Rp. 13.343.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,99%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah tingkat pemahaman/pengetahuan terkait dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan masih harus ditingkatkan sebagai team work yang baik demi terciptanya dokumen pertanggungjawaban yang akurat untuk meminimalisir temuan pemeriksa.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah selalu berusaha untuk belajar dari berbagai pihak jika ada kendala yang dihadapi dan saling membantu agar tercipta laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.

2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Laporan Kegiatan Akhir Tahun yang dilaksanakan oleh OPD** dengan target kinerja sebesar **100%** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00%**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 4.000.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 3.927.000**; atau realisasi keuangan sebesar **98,18%**.

Masalah yang dihadapi pada penyusunan Laporan adalah Data pendukung yang belum valid atau belum didapatkan sehingga laporan terkadang harus terlambat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah selalu berkoordinasi ke pihak yang terkait dalam penyusunan laporan agar tercipta laporan yang akuntabel dan tetap waktu

2.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00%**.

Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 140.873.100**; dan terealisasi sebesar **Rp. 140.844.560**; atau realisasi keuangan sebesar **99,98%**.

2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 3.993.100**; dan terealisasi sebesar **Rp. 3.985.000**; atau realisasi keuangan sebesar **99,80%**.

Pada sub kegiatan ini, tidak ada **masalah** yang dihadapi.

2.3.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk kelancaran kinerja peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 136.880.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 136.859.560**; atau realisasi keuangan sebesar **99,99%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

2.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 39.362.140**; dan terealisasi sebesar **Rp. 39.316.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,88%**.

2.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Biaya Jasa listrik dan air** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 6.804.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 6.759.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,35%**. Pada sub kegiatan ini, **tidak ada masalah** yang dihadapi.

2.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Biaya Operasional Dinas** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 32.558.140**; dan terealisasi sebesar **Rp. 32.557.000**; atau realisasi keuangan sebesar **100,00%**. Pada sub kegiatan ini, **tidak ada masalah** yang dihadapi.

2.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terlaksananya kegiatan operasional Dinas secara optimal** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 %**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 172.008.900**; dan terealisasi sebesar **Rp. 171.261.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,57%**.

2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Biaya operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir

periode adalah **100,00%**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 49.230.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 48.872.000**; atau realisasi keuangan sebesar **99,27%**.

Masalah yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah adanya peraturan terkait pagu anggaran untuk pemeliharaan kendaraan yang relatif kecil yang tidak sesuai dengan kebutuhan dimana kendaraan dinas yang dimiliki adalah kendaraan dinas yang sudah butuh perawatan banyak (penggantian alat) dengan spesifikasi yang relatif mahal sesuai dengan jenis kendaraan tersebut namun alokasi anggaran sedikit. Hal itu juga berpengaruh pada alokasi untuk belanja BBM.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan belanja seefisien mungkin.

2.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00%**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 25.650.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 25.649.500**; atau realisasi keuangan sebesar **100,00%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

2.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00%**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 97.128.900**; dan terealisasi sebesar **Rp. 96.740.000**; atau realisasi keuangan sebesar **99,60%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

2.6. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terlaksananya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00%**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.076.959.800**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.877.765.850**; atau realisasi keuangan sebesar **90,41%**.

2.6.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 122.448.800**; dan terealisasi sebesar **Rp. 122.351.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,92%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Tidak adanya honor admin PPID sehingga admin kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk memberikan informasi ke admin Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Berupaya untuk menganggarkan honor admin PPID.

2.6.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Dokumentasi analisa data dan informasi pembangunan daerah** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 836.289.650**; dan terealisasi sebesar **Rp. 637.253.100**; atau realisasi keuangan sebesar **76,20%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Masih terbatasnya materi/konten penyebarluasan informasi Pemkab Bantaeng karena hanya bertumpu dari materi kehumasan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Berupaya kedepan agar membangun ruang interaksi informasi antar OPD/Lembaga agar materi informasi yang didapat lebih variatif dan inspiratif.

2.6.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Dokumentasi analisa data dan informasi pembangunan daerah** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 1.002.916.250**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.002.916.250**; atau realisasi keuangan sebesar **100,00%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Masih perlunya kesepahaman antara pihak Pemkab. Bantaeng dengan Media dalam mewujudkan tugas dan fungsi masing-masing, Terbatasnya anggaran untuk memaksimalkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai media.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Berupaya untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak dalam hal optimalisasi fungsi dan tugas dalam bermitra, Perlunya mengalokasikan anggaran publikasi secara lebih maksimal.

2.6.4. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Kemudahan akses informasi penyelenggaraan pembangunan daerah** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan

sebesar **Rp. 92.105.400**; dan terealisasi sebesar **Rp. 92.105.400**; atau realisasi keuangan sebesar **100,00%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini sama adalah Tidak adanya kendaraan dinas operasional yang bisa di gunakan oleh tim liputan khususnya jika ada kegiatan di pelosok sehingga menghambat fasilitasi peliputan kegiatan pembangunan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Menggunakan kendaraan masing-masing walaupun tidak maksimal dan berusaha untuk tetap melakukan koordinasi agar kendaraan dinas operasional bisa tersedia dalam rangka peningkatan kinerja Tim kehumasan dalam peliputan berita dan publikasi.

2.6.5. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Penyelenggaraan Harkitnas** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 9.999.900**; dan terealisasi sebesar **Rp. 9.999.900**; atau realisasi keuangan sebesar **100,00%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

2.7. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Tersedianya Saluran Data/Informasi Yang Tepat, Cepat, Lengkap dan Akurat** dengan target kinerja sebesar **60 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **60,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 144.777.230**; dan terealisasi sebesar **Rp. 144.593.396**; atau realisasi keuangan sebesar **99,87%**.

2.7.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Infrastruktur Jaringan IT dan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal** dengan target kinerja sebesar **50 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **50,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 144.777.230**; dan terealisasi sebesar **Rp. 144.593.396**; atau realisasi keuangan sebesar **99,87%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Aplikasi yang ada di jaringan intra masih menggunakan internet ketika di akses.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Server dan aplikasi yang ada dalam jaringan intra sebaiknya diakses menggunakan ip lokal jika menggunakan jaringan yg di sediakan oleh diskominfo.

2.8. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan e-government daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik** dengan target kinerja sebesar **80 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **80,00 %**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 2.560.406.440**; dan terealisasi sebesar **Rp. 2.268.502.080**; atau realisasi keuangan sebesar **88,60%**.

2.8.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Terlaksananya Tata Kelola e-Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal** dengan

target kinerja sebesar **85 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **85,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.237.406.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 1.952.406.000**; atau realisasi keuangan sebesar **87,26%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Belanja yang tidak bisa terbayarkan walaupun sudah terealisasi secara fisik.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah Menginformasikan terkait utang belanja ke Bagian keuangan agar bisa ditindaklanjuti segera.

2.8.2. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Tersedianya sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi informasi bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** dengan target kinerja sebesar **80 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **80,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 274.232.340**; dan terealisasi sebesar **Rp. 267.449.580**; atau realisasi keuangan sebesar **97,53%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini adalah Banyaknya skpd yang membuat aplikasi tanpa koordinasi dengan diskominfo, sehingga beberapa aplikasi hanya jalan pada saat tahun pertama, dan ketika ada masalah baru menghubungi diskominfo, Aplikasi Keuangan SIADINDA tidak menggunakan sub domain dalam mengakses, IP dan port nya diperlihatkan di publik.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah sertifikasi elektronik adalah 1. akan diajukan saran ke depan, jika tidak menyalahi aturan agar Diskominfo dimasukkan ke dalam TAPD agar pepres SPBE Bisa berjalan optimal, dan beberapa Kab/Kota maju telah melakukan itu contohnya :

Banyuwangi, Bandung, Surabaya, 2. Sebelum Perencanaan dan pencairan anggaran sebaiknya skpd harus mendapatkan surat rekomendasi dari diskominfo agar kegiatan tersebut bisa di rencanakan atau dicairkan anggaran nya. Sebaiknya Aplikasi Keuangan SIADINDA menggunakan subdomain bantaengkab.go.id.

2.8.3. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 48.768.100**; dan terealisasi sebesar **Rp. 48.646.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,75%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2022 untuk urusan **Komunikasi dan Informatika** memiliki 3 (Tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Dari program tersebut dapat dianalisis kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini, ada beberapa kegiatan yang ditetapkan guna mendukung kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan **indikator kinerja Program** yang telah ditetapkan yaitu **Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah**

Daerah Kabupaten/Kota, dan melihat dari capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program tersebut dimana target program sebesar **100 Persen** dan bisa terealisasi **100,00 Persen** walaupun dari segi keuangan hanya terealisasi sebesar **91,73%** maka bisa dikatakan bahwa hal itu sudah sesuai untuk menunjang kinerja Program yang telah ditetapkan.

2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Pada program ini, ada 1 (Satu) kegiatan yang ditetapkan guna mendukung kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan tersebut ada 6 (Enam) sub kegiatan yang dipilih untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Layanan Hubungan Media
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Berdasarkan **indikator kinerja Program** yang telah ditetapkan yaitu **Persentase Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik**, dan melihat dari capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program tersebut dimana target di rencanakan **100 Persen** dan terealisasi sebesar **100,00 Persen** walaupun dari segi keuangan hanya bisa terealisasi sebesar **90,41%** namun hal itu tidak membuat kinerja berkurang karena apa yang direncanakan tetap bisa terlaksana namun hanya kemampuan keuangan yang membuat hal tersebut tidak bisa terbayarkan maka bisa dikatakan bahwa hal itu sudah sesuai untuk menunjang kinerja Program yang telah ditetapkan.

3) Program Aplikasi Informatika

Pada program ini, ada 2 (Dua) kegiatan yang ditetapkan guna mendukung kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu :

- **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Dalam kegiatan tersebut ada 1 (Satu) sub kegiatan yang dipilih untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam kegiatan tersebut ada 3 (Tiga) sub kegiatan yang dipilih untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan **indikator kinerja Program** yang telah ditetapkan yaitu **Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan melihat dari capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program dimana Target direncanakan sebesar **2,5 Indeks** dan terealisasi yaitu **2,29 Indeks** namun dari segi keuangan hanya terealisasi **89,20%**. Realisasi keuangan tersebut menyisakan utang kepada pihak ketiga. Dari hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa hal itu sudah sesuai untuk menunjang kinerja Program yang telah ditetapkan. Target tidak bisa tercapai karena adanya perubahan indikator penilaian serta Arsitektur SPBE yang awalnya di rencanakan namun tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KKEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1		/...../.....	1..... 2..... Dst.....	1..... 2..... Dst.....	1..... 2..... Dst.....
2/...../.....	1..... 2..... Dst.....	1..... 2..... Dst.....	1..... 2..... Dst.....

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh : pembangunan jalan, *output*nya adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan social dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcomenya* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak masuk dalam OPD yang berwenang atas urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga tidak ada yang bisa dilaporkan/analisis.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	Dokumen pendukung laporan yang kadang terlambat sehingga laporan juga harus terlambat	selalu melakukan koordinasi dan konsultasi demi kelancaran pelaksanaan tugas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	adanya pembayaran tunjangan ASN (TPP) yang tidak terealisasi sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu selama 4 Bulan dari bulan September – Desember 2022 namun kinerja sub kegiatan tetap di capai	memberikan pemahaman ke ASN bahwa hal ini sebagai sesuatu yang harus terjadi karena kondisi keuangan daerah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							karena ASN melakukan tugas seperti biasa		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	Pemahaman/pengetahuan terkait dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan masih harus ditingkatkan sebagai team work yang baik demi terciptanya dokumen pertanggungjawaban yang akurat untuk meminimalisir temuan pemeriksa	Selalu berusaha untuk belajar dari berbagai pihak jika ada kendala yang dihadapi dan saling membantu agar tercipta laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	100 Persen	Data pendukung yang belum valid atau belum di dapatkan sehingga laporan terkadang harus terlambat	selalu berkoordinasi ke pihak yang terkait dalam penyusunan laporan agar tercipta laporan yang akuntabel dan tetap waktu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	100 Persen	- Tidak ada masalah yang dihadapi		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen	- Tidak ada masalah yang dihadapi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	- Tidak ada masalah yang dihadapi		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 Persen	100 Persen	adanya peraturan terkait pagu anggaran untuk pemeliharaan kendaraan yang relatif kecil yang tidak sesuai dengan kebutuhan dimana kendaraan dinas yang dimiliki adalah kendaraan dinas yang sudah butuh perawatan banyak (penggantian alat) dengan spesifikasi yang relatif mahal sesuai dengan jenis kendaraan tersebut namun alokasi anggaran sedikit. Hal itu juga berpengaruh pada alokasi untuk belanja BBM	melakukan belanja seefisien mungkin	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Persen	100 Persen	- Tidak ada masalah yang dihadapi		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	100 Persen	100 Persen	- Tidak ada masalah yang dihadapi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kantor atau Bangunan Lainnya					
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100 Persen	100 Persen			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100 Persen	100 Persen	Tidak adanya honor admin PPID sehingga admin kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk memberikan informasi ke admin Kabupaten	Berupaya untuk menganggarkan honor admin PPID	
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100 Persen	100 Persen	Masih terbatasnya materi/konten penyebaran informasi Pemkab Bantaeng karena hanya bertumpu dari materi kehumasan	Berupaya kedepan agar membangun ruang interaksi informasi antar OPD/Lembaga agar materi informasi yang didapat lebih	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								variatif dan inspiratif	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100 Persen	100 Persen	Masih perlunya kesepahaman antara pihak Pemkab. Bantaeng dengan Media dalam mewujudkan tugas dan fungsi masing-masing	Berupaya untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak dalam hal optimalisasi fungsi dan tugas dalam bermitra	
							Terbatasnya anggaran untuk memaksimalkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai media	Perlunya mengalokasikan anggaran publikasi secara lebih maksimal	
				Pelayanan Informasi Publik	100 Persen	100 Persen	Tidak adanya kendaraan dinas operasional yang bisa di gunakan oleh tim liputan khususnya jika ada kegiatan di pelosok sehingga menghambat fasilitasi peliputan kegiatan pembangunan	Menggunakan kendaraan masing-masing walaupun tidak maksimal dan berusaha untuk tetap melakukan koordinasi agar kendaraan dinas operasional bisa tersedia dalam rangka peningkatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
								kinerja Tim kehumasan dalam peliputan berita dan publikasi	
				Layanan Hubungan Media	100 Persen	100 Persen	Tidak ada masalah		
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100 Persen	100 Persen	Masih minimnya koordinasi antar lembaga dalam membangun fasilitas kehumasan di lingkup Pemkab. Bantaeng	Perlunya komunikasi dan koordinasi antar lembaga/OPD agar fungsi-fungsi kehumasan dapat dilakukan lebih massif dan terorganisir	
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,5 Indeks	2,29 Indeks			
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Persen	60 Persen			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50 Persen	50 Persen	Aplikasi yang ada di jaringan intra masih menggunakan	Server dan aplikasi yang ada dalam jaringan intra	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							internet ketika di akses	sebaiknya diakses menggunakan ip lokal jika menggunakan jaringan yg di sediakan oleh diskominfo	
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 Persen	80 Persen			
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85 Persen	85 Persen	Belanja yang tidak bisa terbayarkan walaupun sudah terealisasi secara fisik	Menginformasikan terkait utang belanja ke Bagian keuangan agar bisa di tindaklanjuti segera	
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	80 Persen	80 Persen	Banyaknya skpd yang membuat aplikasi tanpa koordinasi dengan diskominfo, sehingga beberapa aplikasi hanya jalan pada saat tahun pertama, dan ketika ada masalah baru	1. akan diajukan saran ke depan, jika tidak menyalahi aturan agar Diskominfo dimasukkan ke dalam TAPD agar pepres SPBE Bisa berjalan optimal, dan beberapa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							menghubungi diskominfo	Kab/Kota maju telah melakukan itu contohnya : Banyuwangi, Bandung, Surabaya	
								2. Sebelum Perencanaan dan pencairan anggaran sebaiknya skpd harus mendapatkan surat rekomendasi dari diskominfo agar kegiatan tersebut bisa di rencanakan atau dicairkan anggarannya	
							Aplikasi Keuangan SIADINDA tidak menggunakan sub domain dalam mengakses , IP dan port nya diperlihatkan di publik	Sebaiknya Aplikasi Keuangan SIADINDA menggunakan subdomain bantaengkab.go.id	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak ada masalah		

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KKEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUAN REKOMENDASI DPRD
1									
2								
								

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng untuk urusan Komunikasi dan Informatika, tidak ada kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar melaksanakan percepatan pelaksanaan administrasi dan kegiatan fisik agar pelaksanaan tidak sampai akhir tahun sehingga pembayaran bisa dilaksanakan di tahun berjalan dan tidak menjadi hutang Pemda;	Pada Tahun 2021, ada pekerjaan yang lambat di selesaikan namun sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang seharusnya, hal itu karena merupakan pekerjaan fisik di anggaran pergeseran sehingga kontrak tidak bisa dilakukan sebelum pagu disetujui. Pada Tahun mendatang, diusahakan agar pekerjaan fisik dianggarkan di anggaran pokok sehingga kontrak bisa dibuat lebih awal	Mengurangi beban kewajiban pemda agar tidak menjadi utang di tahun berikutnya
2	Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk pengoptimalisasian kegiatan di UPTD dalam rangka pemenuhan target PAD;	Diskominfo tidak memiliki UPTD dalam rangka pengelolaan PAD	PAD yang dikelola diskominfo bisa memenuhi target PAD
3	Belajar dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, dimana banyak utang pemda kepada rekanan, disebabkan diantaranya, karena keterlambatan proses administrasi pengerjaannya, demikian karena persoalan ketersediaan dan kepastian anggaran yang terkadang tidak jelas. Untuk itu direkomendasikan agar	Untuk utang pemda yang terjadi di tahun 2021, awalnya sudah sesuai prosedur dan sudah di garansi bahwa anggarannya ada namun kemampuan riil keuangan pemda yang tidak mampu sehingga menjadi utang di tahun 2022	Pada Tahun 2022, kami percaya bahwa kemampuan keuangan mampu untuk membiayai belanja yang ada di OPD kami karena dilakukan beberapa kali asistensi terkait hal itu, namun pun masih menyisakan utang di tahun 2023

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	semua kegiatan yang bersifat keproyekan agar agar proses administrasi pengerjaannya diantisipasi berdasarkan rasio waktu pengerjaannya dan perlunya garansi akan kepastian adanya alokasi anggaran pada setiap jenis pekerjaan;		
4	Membaca trend capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang memposisikan kabupaten Bantaeng pada urutan pertama dan terbaik, maka menjadi tantangan bagi seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah (Eksekutif dan Legislatif) khususnya OPD terkait untuk menjaga dan merawat Sektor-sektor penopang yang memposisikan Kab.Bantaeng berada pada level (rating) itu. Dan tentu harapan terbesarnya adalah, dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan income perkapita penduduk, maka kesejahteraan masyarakat Bantaeng pun semakin meningkat dan membaik;	Diskominfo akan selalu bersinergi dan membuka ruang diskusi maupun melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya di tahun 2022 dengan tetap menyediakan internet di ruang publik dengan alokasi yang lebih besar dari tahun sebelumnya serta melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait internet	Akses internet akan selalu diupayakan mendapatkan porsi yang prioritas di OPD kami agar masyarakat bisa mengakses internet dengan gratis di area publik yang telah disediakan
5	Merekomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar melaksanakan percepatan pelaksanaan	Idem dengan point 1	Idem dengan point 1

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	administrasi dan kegiatan fisik agar pelaksanaan tidak sampai akhir tahun sehingga pembayaran bisa dilaksanakan ditahun berjalan dan tidak menjadi hutang Pemda.		
6	Meminta Kepada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan DPRD menanggapi dengan serius apa yang menjadi Pendapat Akhir dari setiap Fraksi di DPRD Kabupaten Bantaeng.	- Diskominfo selalu berusaha menanggapi dengan serius apa yang menjadi Pendapat Akhir dari setiap Fraksi di DPRD Kabupaten Bantaeng.	- Pendapat akhir fraksi selalu di tindaklanjuti oleh diskominfo
7	Secara umum LKPJ Tahun 2021 sangat miskin dengan data pendukung sehingga sulit untuk mengukur kinerja kepala daerah secara objektif misalnya saja tidak ada pendekatan statistik tiba-tiba berkesimpulan sekian persen angka keberhasilannya	- Dalam mengukur keberhasilan, biasanya kami hanya melihat berapa target yang telah di tetapkan dan apa yang menjadi acuan sehingga hal tersebut mencapai atau tidak sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan jadi bisa saja pagu terealisasi tidak 100% sesuai target tapi kinerja tercapai baik karena apa yang di rencanakan itu telah ada secara fisik/selesai.	- Pengukuran kinerja sub kegiatan sudah bisa teratasi dengan adanya keseragaman dalam penentuan indikator kinerja sub kegiatan dengan dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi namun dalam penginputan RKA sampai perubahan anggaran, indikator yang masuk masih memakai indikator masing-masing OPD, belum memakai indikator yang seragam. keseragaman indikator berlaku efektif di tahun 2023

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
8	Sistim perencanaan dan arah kebijakan daerah belum konsisten diterapkan kedalam realisasi program dan kegiatan terkadang kebijakannya jelas, akan tetapi pada realisasi sudah tidak jelas demikian pula sistim perencanaan belum jelas berapa persentase hasil-hail musrenbang yang diakomodir kedalam setiap penerapan APBD	- Terkait arah kebijakan yang tidak konsisten, kami tetap berusaha untuk mengusulkan program/kegiatan yang telah di tetapkan dalam Renstra maupun Renja yang tela dibuat namun dalam perjalanan, kendala kemampuan keuangan tidak bisa dianggap hal yang sepele sehingga terkadang ada hal yang harus di kurangi atau lakukan demi memaksimalkan pagu yang telah di berikan.	- Keselarasan antara program kegiatan yang diusulkan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
		- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berusaha mengakomodir usulan musrenbang sesuai dengan arahan Bappeda	- Hasil musrenbang tetap ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah.
9	Secra umum LKPJ ini hanya mengurai hal-hal keberhasilan kan tetapi kurang bahkan tidak menguraikan masalah, hambatan, tantangan, bahkan kegagalan, sehingga sulit untuk kita mengintrospeksi diri dalam rangka usaha perbaikan kedepan.	- Dalam LKPJ kami di tahun 2021, jika ada masalah yang dihadapi dan dianggap perlu untuk dilaporkan/catat, maka akan di masukkan ke dalam laporan.	- Mengetahui permasalahan dan solusi yang dilakukan sebagai bentuk perbaikan untuk tahun berikutnya atau sebagai catatan penting dalam pengambilan kebijakan.
10	Document perencanaan yang selama ini disusun tidak reflex terhadap perkembangan kemajuan dan perubahan regulasi di tingkat pusat sehingga menyulitkan dalam melakukan hal-hal pelaksanaan tugas	- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng selalu mengikuti aturan yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal penyusunan dokumen. Ketika ada perubahan yang tidak	- Selalu mengikuti aturan yang diberikan dalam penyusunan dokumen perencanaan, ketika ada yang belum kami tindaklanjuti itu karena kami lupa atau memang belum

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>pemerintahan, beberapa OPD tidak konsisten memberikan laporan anggaran yang dikelola yang bersumber dari tugas pembantuan dari dekonsentrasi. Demikian pula pada manajemen pengelolaannya agar lebih optimal sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan masyarakat.</p>	<p>kami tindaklanjuti, mungkin itu karena belum ada informasi terbaru yang kami dapatkan atau tidak adanya pemberitahuan bahwa dokumen yang kami berikan itu sudah usang.</p>	<p>mendapatkan informasi yang baru.</p>
11	<p>Dari permasalahan yang muncul akibat tidak tercapainya realisasi belanja daerah secara maksimal dari berbagai dinas yang ada maka Fraksi Pan merekomendasikan peningkatan pendapatan untuk setiap dinas serta mengkaji lebih dalam sumber-sumber dana yang bisa didapatkan pada setiap dinas agar seluruh target dapat tercapai secara maksimal</p>	<p>- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menargetkan PAD sesuai dengan peraturan yang ada, belum ada ruang untuk menambah PAD kecuali jika ada penambahan Tower baru. Untuk Tahun 2022 sudah berusaha maksimal agar PAD bisa terealisasi 100% atau tidak ada tunggakan dari Pihak penyedia layanan</p>	<p>- Target PAD sudah sesuai aturan yang berlaku</p>
12	<p>Dengan adanya target PAD yang jauh dari capaian, dari beberapa dinas Fraksi PAN merekomendasikan ke seluruh OPD untuk melakukan komunikasi koordinasi secara intensif antar OPD maupun mitra kerja DPRD sehingga tercipta keselarasan antara</p>	<p>- Untuk Tahun 2022, target sudah sesuai dengan real yang bisa di capai bahkan melebihi target, beda dengan Tahun sebelumnya yang masih mengalokasikan PAD yang terlampau besar dari apa yang bisa di tagih, dan Komunikasi dengan mitra kerja DPRD selalu dilakukan</p>	<p>- Target PAD sudah real sesuai dengan potensi yang bisa tertagih untuk tahun 2021 dan Tahun 2022.</p>

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	target dan realisasi yang diharapkan.	setiap tahun terkait target dan realisasi PAD	
13	OPD fraksi PAN merekomendasikan untuk menata nomenklatur program antara OPD sehingga program menjadi fokus serta teratur dan berkesinambungan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.	- Nomenklatur program yang dijalankan sudah berkesinambungan setiap tahun sesuai dengan nomenklatur yang ada (update) karena aturan terkait nomenklatur biasa ada perubahan dari pusat sehingga kami harus menyesuaikan kembali	- menurut kami kesinambungan program sudah sesuai dengan apa yang direkomendasikan DPRD
14	Dengan tidak dimasukkannya capaian dari visi pemerintah pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 ini maka fraksi PAN merekomendasikan untuk memasukkan capaian visi untuk masa tahun berjalan sebagai hasil dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) karena fraksi PAN memandang visi tanpa target adalah sia-sia sehingga dari Visi Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir dan bathin berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian dan keunggulan berbasis agama dan budaya pada tahun 2021 tersebut apa yang telah dicapai..?	- Capaian visi tertuang dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dan itu terangkum dalam RPJMD yang disusun oleh Bappeda, sementara kami di OPD bekerja dengan dasar Renstra sebagai turunan dari RPJMD dan Renja yang merupakan turunan dan RKPD sehingga capaian dari visi secara keseluruhan, bukan merupakan kewajiban kami untuk membuat laporan capaiannya	- Capaian visi pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan yang dibuat Bappeda
15	Kemudian juga Fraksi PAN juga	- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan	- Capaian program sudah sejalan

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	merekomendasikan dari 6 misi yang dijalankan pemerintah daerah ada prosentase dari gambaran capaian dari program – program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.	Persandian selalu membuat capaian dari program yang telah dilakukan	dengan apa yang tertuang dalam program yang ada dalam RPJMD
16	Fraksi Pan merekomendasikan untuk melahirkan produk-produk kebijakan yang outputnya menjadikan masyarakat Bantaeng menjadi sejahtera sebagaimana harapan dari visi pemerintah untuk tahun 2018 – 2023.	- Kominfo selalu berupaya melakukan kegiatan sesuai yang tertuang dalam Renstra yang telah di tetapkan dengan mengakomodir kebijakan yang bisa kami lakukan untuk hal tersebut, misalnya dengan memberikan pelatihan/sosialisasi ke masyarakat	- Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung
17	Dari kecilnya realisasi dari 2 catatan pendapatan pemerintah daerah pada point catatan tersebut maka fraksi PAN merekomendasikan pada pemerintah Daerah agar mengambil kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat sehingga PAD bisa meningkat dan harus melakukan perbaikan sumber daya manusia pada bagian Pendapatan Daerah yang mempunyai komitmen dan konsistensi untuk meningkatkan PAD di kabupaten Bantaeng.	- Kebijakan terkait peningkatan PAD menjadi ranah dari Bagian Keuangan dan tetap terikat dengan aturan dari Pusat	- Peningkatan PAD selalu dilakukan selama tidak menyalahi aturan yang berlaku

NO	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
18	Kedepan pemerintah wajib dan harus melahirkan ide-ide kreatif dalam rangka peningkatan PAD karena ini sangat urgen dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin ditingkatkan.	- Kebijakan terkait hal tersebut akan dipikirkan lebih lanjut, mengingat adanya pengurangan obyek pajak dari pemerintah pusat yang bisa jadi PAD diskominfo akan terhapus di tahun-tahun mendatang berdasarkan Undang-Undangn Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa Tower tidak bisa lagi di pungut	- Kekurangan anggaran bisa sedikit teratasi jika ada peningkatan PAD
19	Dari catatan serius diatas fraksi PAN merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan kebijakan guna meningkatkan PAD di Kabupaten Bantaeng.	- Kebijakan terkait peningkatan PAD menjadi ranah dari Bagian Keuangan dan tetap terikat dengan aturan dari Pusat	- Peningkatan PAD selalu dilakukan selama tidak menyalahi aturan yang berlaku

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak mengelola dana Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Pusat

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

URUSAN : STATISTIK

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2022 untuk urusan **Statistik** memiliki 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

1.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan untuk program ini adalah **Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat** dengan target sebesar **40 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **40,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 48.399.650;** dan terealisasi sebesar **Rp. 48.321.200;** atau realisasi keuangan sebesar **99,84%.**

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Penyediaan data statistik daerah yang lengkap dan akurat** dengan target kinerja sebesar **40 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **40,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 48.399.650;** dan terealisasi

sebesar **Rp. 48.321.200**; atau realisasi keuangan sebesar **99,84%**.

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Tersedianya data statistik yang lengkap dan akurat** dengan target kinerja sebesar **40 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **40,00%**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 48.399.650**; dan terealisasi sebesar **Rp. 38.304.650**; atau realisasi keuangan sebesar **47,97%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi.

- 3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng 2022 untuk urusan **Statistik** memiliki 1 (Satu) Program, 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan. Dari program tersebut dapat dianalisis kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pada program ini, ada beberapa 1 kegiatan yang ditetapkan guna mendukung kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Berdasarkan **indikator kinerja Program** yang telah ditetapkan yaitu **Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat**, dan melihat dari capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program dimana target yang telah ditetapkan sebesar **40 Persen** dan terealisasi sebesar **40,00 Persen**, dari segi keuangan terealisasi sebesar **99,84%**. Dari hal tersebut tersebut maka bisa dikatakan sudah sesuai untuk menunjang kinerja Program yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KKEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUAN REKOMENDASI DPRD
1			/	/	1..... . 2..... . Dst.... .	1..... 2..... Dst.....	1..... . 2..... . Dst.... .
2//.....	1..... . 2..... . Dst.... .	1..... 2..... Dst.....	1..... . 2..... . Dst.... .

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh : pembangunan jalan, *outputnya* adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan social dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcomenya* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak masuk dalam OPD yang berwenang atas urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga tidak ada yang bisa dilaporkan/analisis.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Statistik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	40 Persen	40 Persen			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40 Persen	40 Persen			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40 Persen	40 Persen	Tidak ada masalah		

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

N O	URU SAN PEM ERI NTA HAN	ORGANI SASI PERANG KAT DAERAH PELAKS ANA	KE BIJ AK AN	URAIA N PROG /KKEG	TAR GET	REALI SASI	PER MAS ALAH AN	UPAYA MENG ATASI PERMA SALAH AN	TINJU T REKO MEND ASI DPRD
1									
2								

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng untuk urusan Statistik, tidak ada kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

Untuk tindak lanjut rekomendasi sudah di tuangkan dalam urusan Komunikasi Informatika sehingga tidak di tuangkan ulang pada urusan Statistik karena tidak ada rekomendasi spesifik untuk Statistik dalam rekomendasi tersebut.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak mengelola dana Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Pusat

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

URUSAN : PERSANDIAN

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2022 untuk urusan **Persandian** memiliki 1 (Satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

1.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan untuk program ini adalah **Persentase komunikasi daerah yang memnfaatkan persandian** dengan target sebesar **40 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **40,00 Persen**. Sementara pagu yang di tetapkan sebesar **Rp. 100.470.430**; dan terealisasi sebesar **Rp. 99.684.600**; atau realisasi keuangan sebesar **64,79%**.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah **Terselenggaranya kegiatan sosialisasi keamanan informasi dan terimplementasinya sertifikasi elektronik**

dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **100,00**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 85.100.930**; dan terealisasi sebesar **Rp. 84.675.100**; atau realisasi keuangan sebesar **99,50%**.

2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Pemeliharaan dan Perbaikan alat pendukung persandian dan Terlaksananya pengumpulan Data untuk pengisian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) 1 Kali** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 28.505.800**; dan terealisasi sebesar **Rp. 28.465.000**; atau realisasi keuangan sebesar **99,86%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah Kurangnya SDM Persandian (Sandiman dan Tenaga Keamanan Informasi).

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah Pengajuan ke BKPSDM untuk pengadaan SDM.

2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Terimplementasinya Sertifikasi Elektronik 1 Kali** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 41.135.130**; dan terealisasi sebesar **Rp. 40.837.600**; atau realisasi keuangan sebesar **99,28%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah Penerapan Sertifikat Digital belum terlaksana karena belum ada peraturan yang mengatur penggunaan TTD Digital di lingkup Pemkab bantaeng.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah Penyusunan Perbup Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemkab Bantaeng T.A. 2023

2.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Terlaksananya Kegiatan Respon Insiden Siber (CSRIT) 1 Kali** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 15.460.000**; dan terealisasi sebesar **Rp. 15.372.500**; atau realisasi keuangan sebesar **99,43%**.

Adapun **masalah** yang dihadapi dalam hal ini adalah Kegiatan ITSA tidak terlaksana karena Anggaran yang tidak memadai.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah Bersurat ke BSSN terkait pelaksanaan ITSA yang anggarannya ditanggung oleh BSSN

2.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini, indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan adalah

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengamanan berita dan informasi dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja di akhir periode tercapai **100,00 Persen**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 15.369.500**; dan terealisasi sebesar **Rp. 15.009.500**; atau realisasi keuangan sebesar **97,66%**.

2.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah **Terselenggaranya Kegiatan Administrasi persandian dan Meningkatnya kelancaran persuratan antar-daerah** dengan target kinerja sebesar **100 Persen** dan kinerja yang tercapai di akhir periode adalah **100,00**. Sementara pagu yang ditetapkan sebesar **Rp. 15.369.500**; dan terealisasi sebesar **Rp. 15.009.500**; atau realisasi keuangan sebesar **97,66%**.

Tidak ada **masalah** yang dihadapi pada sub kegiatan ini.

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng untuk urusan **Persandian** memiliki 1 (Satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan. Dari program tersebut dapat dianalisis kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pada program ini, ada beberapa 2 (Dua) kegiatan yang ditetapkan guna mendukung kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan sub kegiatan untuk mendukung kinerja dari kegiatan yaitu :

a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan **indikator kinerja Program** yang telah ditetapkan yaitu **Persentase komunikasi daerah yang memnfaatkan persandian**, dan melihat dari capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program dimana target **40 Persen** dan terealisasi sebesar **40,00 Persen** dengan realisasi keuangan sebesar **99,22%**. Berdasarkan Realisasi kinerja dan keuangan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hal itu sudah sesuai untuk menunjang kinerja Program yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KKEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUAN REKOMENDASI DPRD
1			/	/	1..... . 2..... . Dst....	1..... 2..... Dst.....	1..... . 2..... . Dst....
								

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh : pembangunan jalan, *outputnya* adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan social dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcomenya* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak masuk dalam OPD yang berwenang atas urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga tidak ada yang bisa dilaporkan/analisis.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Persandian	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	40 Persen	40 Persen			
				Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Kurangnya SDM Persandian (Sandiman dan Tenaga Keamanan Informasi)	Pengajuan ke BKPSDM untuk pengadaan SDM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100 Persen	100 Persen	Penerapan Sertifikat Digital belum terlaksana karena belum ada peraturan yang mengatur penggunaan TTD Digital di lingkup Pemkab bantaeng	Penyusunan Perbup Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemkab Bantaeng T.A. 2023	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Kegiatan ITSA tidak terlaksana karena Anggaran yang tidak memadai	Bersurat ke BSSN terkait pelaksanaan ITSA yang anggarannya ditanggung oleh BSSN	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Tidak ada masalah		

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KKEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1									
2								

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng untuk urusan Persandian, tidak ada kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

Untuk tindak lanjut rekomendasi sudah di tuangkan dalam urusan Komunikasi Informatika sehingga tidak di tuangkan ulang pada urusan Persandian karena tidak ada hal spesifik terkait Persandian dalam rekomendasi tersebut.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng tidak mengelola dana Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Pusat

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

Bantaeng, Januari 2023

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng**



H. SUBHAN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP. : 19720321 199402 1 003